

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Tentang Peran

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, Soerjono. 2005: 243). Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola hidupnya. Hal ini, bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) yaitu unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih

banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono, 2005: 244). Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perspektif Teori Peran

Biddle dan Thomas mengepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (semacam skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Dalam kehidupan nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah. Peran sesama pelaku dalam permainan drama digantikan oleh orang lain yang sama-sama menduduki suatu posisi sosial sebagaimana si pelaku peran sosial tersebut. Penonton digantikan oleh masyarakat

yang menyaksikan pembawaan peran oleh seorang pelaku peran. Sutradara digantikan oleh seorang penyelia, guru, orangtua atau agen *socializer* lainnya.

Nampaklah dalam persepektif ini berlaku semacam determinisme sosial dalam batas tertentu, yang berfungsi sebagai sosok kekuasaan yang mengendalikan perilaku individu. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2.1.2. Tinjauan Teori Elit

Gaetano Mosca melakukan distribusi kekuasaan dalam masyarakat yakni kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang yang melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang dihasilkan dari kekuasaan. Kelas yang dipertintah yang berjumlah lebih banyak diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semesta dan paksaan. (Mosca, 1939: 50) sebagaimana dikutip dalam Surbakti, Ramlan (1922: 75). Asumsi yang mendasari model ini adalah setiap masyarakat tidak pernah terdapat distribusi kekuasaan secara merata, jumlah orang yang memiliki kekuasaan politik lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan masyarakat negara serta diantara elit politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai yang berarti mempertahankan status sebagai elit politik (Surbakti, Ramlan. 1922: 75).

Vilfredo Pareto mengemukakan bahwa setiap masyarakat yang diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh (Vama, 2001: 200). Pareto dan Mosca mengaitkan pengertian elit pada kelompok orang-orang secara langsung atau karena posisinya sangat kuat pengaruhnya dalam menjalankan kekuasaan politik. Mereka juga mengakui bahwa elit yang memerintah merupakan kelas politik dan kelompok-kelompok sosial yang terhormat yang oleh Pareto disebut sebagai aristokrasi (Sastroatmodjo, 1995: 145).

Prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi Pareto dan Mosca adalah (Putnam, 1997: 78):

1. Kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata. Gagasan Pareto tentang pemeringkatan orang berdasarkan pemilihan akan barang yang berwujud kekayaan, kecakapan atau kekuasaan politik merupakan hal yang menunjukkan prinsip itu.
2. Pada hakekatnya orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya. Kaum elitis klasik umumnya berpendapat bahwa distribusi kekuasaan hamper dalam segala hal dapat dipandang dari artian dikotomis itu.
3. Secara internal, elit itu bersifat homogen bersatu dan memiliki kesadaran kelompok. Elit itu bukan merupakan suatu kumpulan individu-individu yang saling terpisah atau sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja tetapi

sebaliknya seperti halnya anggota-anggota klub khusus dan terbatas. Individu-individu yang ada dalam kelompok elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip, memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan yang sama.

4. Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas. Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang.
5. Kelompok elit itu pada hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik perlu diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok ini.

Pareto mengemukakan konsep sirkulasi (pergantian) elit (Vama, 2001: 2001). Pareto juga mengatakan bahwa dalam masyarakat ada gerakan yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit kelas atas hingga kelas bawah sedangkan dari tingkat bawah ke tingkat atas menghasilkan suatu peningkatan pada unsur-unsur yang membuat kelas-kelas pemegang kekuasaan terjatuh yang pada akhirnya membuat pihak lain justru meningkat rasa superioritas. Menurut Mosca, karakteristik yang membedakan elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Jika kelas memerintah kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik maka terdapat kemungkinan kelas yang berkuasa akan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.

Konsep residu Pareto memberikan jawaban terhadap terjadinya sirkulasi, dimana yang dimaksudkan dengan “residu” sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Secara garis besar, dalam konsep “residunya” Pareto membagi ke dalam dua hal yaitu residu kombinasi yang dapat diartikan sebagai kelicikan dan residu keuletan bersama yang berarti kekerasan (Vama, 2001: 201).

2.1.3. Tinjauan Tentang Kekuasaan

Kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik namun diantara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*) seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi (*manipulation*), peragaan kekuasaan (*coercion force*) dan kewenangan (*authority*). Pengaruh (*influence*) adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasi (*persuasion*) adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu dan penggunaan pengaruh terhadap yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan dan hal tersebut juga bisa disebut manipulasi.

Pengertian *coercion* adalah ancaman paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi seperti penangkapan penjahat oleh polisi, diinterogasi oleh militer atau melapor secara reguler kepada pihak militer. Sedangkan yang dimaksud

force adalah penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit atau membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu (Surbakti, Ramlan. 1992: 57).

Ciri hubungan kekuasaan adalah merupakan hubungan antar manusia, pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain, pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi atau pemerintah (negara dalam hubungan luar negeri), sasaran kekuasaan yang dipengaruhi dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah (negara), suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif, penggunaan sumber-sumber memungkinkan penggunaan paksaan, konsensus atau kombinasi keduanya, tergantung perspektif moral yang digunakan yakni apakah tujuan yang ingin dicapai itu baik atau buruk, hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat yang mana hal tersebut bergantung pada ada atau tidaknya distribusi kekuasaan yang relatif merata dalam masyarakat tersebut, pada umumnya kekuasaan politik memiliki makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan oleh masyarakat umum sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk sebagian kecil masyarakat dan kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik (Surbakti, Ramlan. 1992: 59).

2.1.4. Tinjauan Tentang Kyai

Istilah kyai merupakan panggilan bagi seseorang yang secara konsisten mengajarkan ilmu agama kepada ummat islam, baik yang memiliki pondok pesantren ataupun tidak. Kyai kerap kali dipandang sebagai pemimpin keagamaan tradisional yang memiliki otoritas memberi fatwa dalam masalah keyakinan dan praktik keislaman, baik dikalangan santri maupun masyarakat secara umum.

Bahkan oleh masyarakat kyai dijadikan sebagai sumber inspirasi dan rujukan tentang berbagai hal, tidak hanya masalah keagamaan tetapi juga bidang kehidupan lainnya, termasuk masalah politik. Menurut Endang Turmudi, Kyai dapat di bedakan menjadi empat kategori yaitu Kyai pesantren, Kyai tarekat, Kyai politik dan Kyai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam.

Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang Kyai dapat di golongan lebih dalam satu kategori. Dari empat kategori tersebut Kyai dapat di bagi menjadi dua kategori lebih besar dalam kaitannya dengan pengikutnya, yaitu:

a. Kyai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih

luas daripada Kyai yang masuk kategori kedua. Kategori ini terdiri atas:

1. Kyai Pesantren, Kyai ini memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dan Kyai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang Kyai. Ketika orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang Kyai maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa Kyai

adalah orang yang patut diikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri yang menyelesaikan pendidikan di suatu pesantren dan kemudian menjadi Kyai maka mereka juga membangun jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan Kyai pesantren dimana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan pesantren.

2. Kyai Tarekat, Kyai ini memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kyai tarekat adalah sebuah lembaga formal, para pengikut Kyai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak dari pada pengikut Kyai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut tarekat.
- b. Kyai yang menyebarkan dan mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Kyai ini terdiri atas Kyai panggung dan Kyai politik.
1. Kyai Panggung, Kyai ini mempunyai pengikut yang mungkin tersebar di seluruh kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal ini dapat terjadi karena hanya Kyai panggung yang populer saja yang bisa di undang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan Kyai panggung bersifat lokal dalam arti hanya di kenal oleh umat Islam didaerahnya saja.
 2. Kyai Politik, Kyai ini lebih merupakan kategori campuran. Ia merujuk kepada Kyai yang mempunyai concern untuk mengembangkan NU secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama di kelola oleh kategori Kyai

ini yang tidak mempunyai pengikut seperti Kyai lain.

Kyai adalah istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi bagi ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik pada santrinya. Meskipun tidak semua Kyai memiliki pesantren, namun yang jelas bahwa Kyai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada Kyai yang tidak memiliki pesantren. Karenanya, pesantren adalah lembaga penting tempat Kyai menjalankan fungsi sosialnya, termasuk dalam menjalankan kekuasaan politik.

2.1.5. Tinjauan Tentang Pilihan Politik

Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2005), partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Dikutip dari buku Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (2016) karya Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, partisipasi poliitk bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.

Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Melansir dari jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi *Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (2014) karya Tia Subekti, kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan,

mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak, memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara.

Dalam jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar (2020) karya Ni Ketut Arniti, partisipasi politik merupakan contoh perwujudan negara demokrasi, yang mana masyarakat berperan untuk memilih pejabat negara dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat yaitu: Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah, supaya dapat diperbaiki. Sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.

Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015) karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, partisipasi politik memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh, yaitu:

1. Faktor psikologis, faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik.
2. Faktor ekonomi atau rasional, faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran

tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya.

3. Faktor sosiologis, faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan.

2.1.6. Tinjauan Tentang Pesantren

Salah satu cara penyebaran dan pengajaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan pondok pesantren. Perannya sangat besar dalam masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Mengutip nu.or.id, pengamat pendidikan Darmaningtyas, berpendapat bahwa sejarah pendidikan Indonesia dimulai dari institusi swasta, di lingkungan pesantren dan padepokan.

Sementara itu, dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil Islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kala itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para *cantrik*. Dalam jurnal Al-Ta'dib, *Sejarah Pesantren di Indonesia* yang ditulis oleh Herman DM, dijelaskan bahwa pesantren setidaknya mempunyai tiga unsur, yaitu santri, kiai atau guru, dan asrama atau pondok.

Selanjutnya, banyak orang yang memaknai pesantren semata-mata dengan bentuk bangunan fisik pesantren itu sendiri. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengenal pesantren dari perspektif yang lebih luas, yakni perannya dalam penyebaran Islam di

indonesia, mulai dari membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, keagamaan hingga politik. Lebih lanjut, kata pesantren yang berakar dari kata santri dengan imbuhan “pe-” di awal dan “-an” di akhir, dapat diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Istilah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya juga terdapat asrama bagi para siswa atau muridnya. Dengan kata lain para siswa tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan gurunya.

Para siswa tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Biasanya berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai atau ulama agama Islam yang menetap di suatu tempat. Kemudian, datanglah para santri yang hendak belajar berbagai ilmu agama kepadanya. Tidak jarang santri yang ingin belajar berasal dari daerah yang jauh. Untuk itu, kemudian dibangun pula tempat bermukim para santri di sekitar kediaman kiai tadi. Semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu, akan semakin banyak pula pondok yang dibangun. Tidak jarang santri yang ingin belajar berasal dari daerah yang jauh. Untuk itu, kemudian dibangun pula tempat bermukim para santri di sekitar kediaman kiai tadi. Semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu, akan semakin banyak pula pondok yang dibangun.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan referensi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat memperoleh dan mencari teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu tidak

menggunakan judul yang sama seperti judul penulis namun penulis mengangkat beberapa penelitian yang ada untuk memperbanyak bahan kajian pada penelitian yang dilakukan penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal atau skripsi yang penulis dapat sajikan dalam tabel di bawah ini:

2.3. Kerangka Pemikiran

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, Soerjono. 2005: 243). Biddle dan Thomas mengepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (semacam skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Dalam kehidupan nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah.

Gaetano Mosca melakukan distribusi kekuasaan dalam masyarakat yakni kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang yang melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari kekuasaan. Kelas yang dipertintah yang berjumlah lebih banyak diarahkan dan

dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan (Mosca, 1939: 50) sebagaimana dikutip dalam Surbakti, Ramlan (1922: 75).

Asumsi yang mendasari model ini adalah setiap masyarakat tidak pernah terdapat distribusi kekuasaan secara merata, jumlah orang yang memiliki kekuasaan politik lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan masyarakat negara serta diantara elit politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai yang berarti mempertahankan status sebagai elit politik (Surbakti, Ramlan. 1922: 75).

Kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik namun diantara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*) seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi (*manipulation*), peragaan kekuasaan (*coercion force*) dan kewenangan (*authority*). Pengaruh (*influence*) adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.

Persuasi (*persuasion*) adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu dan penggunaan pengaruh terhadap yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan dan hal tersebut juga bisa disebut manipulasi.

Istilah kyai merupakan panggilan bagi seseorang yang secara konsisten mengajarkan ilmu agama kepada umat islam, baik yang memiliki pondok pesantren ataupun tidak. Kyai kerap kali dipandang sebagai pemimpin keagamaan tradisional yang memiliki otoritas memberi fatwa dalam masalah keyakinan dan praktik keislaman, baik dikalangan santri maupun masyarakat secara umum. Bahkan oleh masyarakat kyai dijadikan sebagai sumber inspirasi dan rujukan tentang berbagai hal, tidak hanya masalah keagamaan tetapi juga bidang kehidupan lainnya, termasuk masalah politik. Menurut Endang Turmudi, Kyai dapat di bedakan menjadi empat kategori yaitu Kyai pesantren, Kyai tarekat, Kyai politik dan Kyai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2005), partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Dikutip dari buku Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (2016) karya Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, partisipasi poliitk bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.

Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Melansir dari jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi *Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (2014) karya Tia Subekti,

kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak.

Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak, memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara.

Berdasarkan kerangka teori di atas, penulis menggambarkan kerangka teori tersebut menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.3.
Kerangka Pemikiran